

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi memiliki kewajiban bersama antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Melihat kondisi eksisting saat ini dimana permasalahan di Provinsi Jawa Barat cukup kompleks, maka pembangunan daerah sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi oleh kebijakan pembangunan memerlukan sinergitas atau keterpaduan. Kurangnya koordinasi akan menimbulkan suatu kemandegan (*stagnan*). Kemudian yang mutlak harus diwaspadai adalah tumpang tindihnya program pembangunan di daerah, sering kali kita melihat bahwa program tanpa sinergitas cenderung tidak tepat sasaran. Untuk itulah, dalam konteks Otonomi Daerah, keberhasilan pembangunan hanya akan dicapai ketika koordinasi/sinergitas antar Instansi/Lembaga tersebut berjalan baik.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah diperlukan usaha yang lebih keras dan sistematis guna mengakselerasi pembangunan pada berbagai bidang secara terintegrasi. Skenario pembangunan daerah Tahun 2013-2018 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yang difokuskan pada Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan,

perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokratisasi dan Otonomi Daerah hubungan Pusat dan Daerah, hubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta hubungan antar lembaga seharusnya berjalan dengan baik dan benar. Transparansi dan keterbukaan disini dapat diartikan sebagai keikhlasan dari tiap sektor untuk mau bekerja sama dan memberikan *sharing* dalam mensukseskan setiap program yang digulirkan. Dengan sikap aparaturnya yang kompeten dan manajemen profesional dalam membina hubungan kerjasama antar Lembaga/Instansi terkait sehingga memperkuat timbulnya koordinasi antar lembaga, karena salah satu sebab koordinasi tidak berjalan maksimal adalah keengganan untuk kerjasama.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah : **“Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”**.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat ditetapkan dalam 5 (lima) Misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua.

Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat yaitu manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa

Barat yaitu infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat yaitu lingkungan Jawa Barat yang menjamin keberlanjutan pembangunan.

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKIP BKPP Wilayah I tahun 2016 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja melalui media laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP ini adalah :

1. Mempertanggung jawabkan kinerja BKPP Wilayah I dan pihak yang berkepentingan (stake holder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good governance*).
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BKPP Wilayah I.

1.3. Dasar Hukum

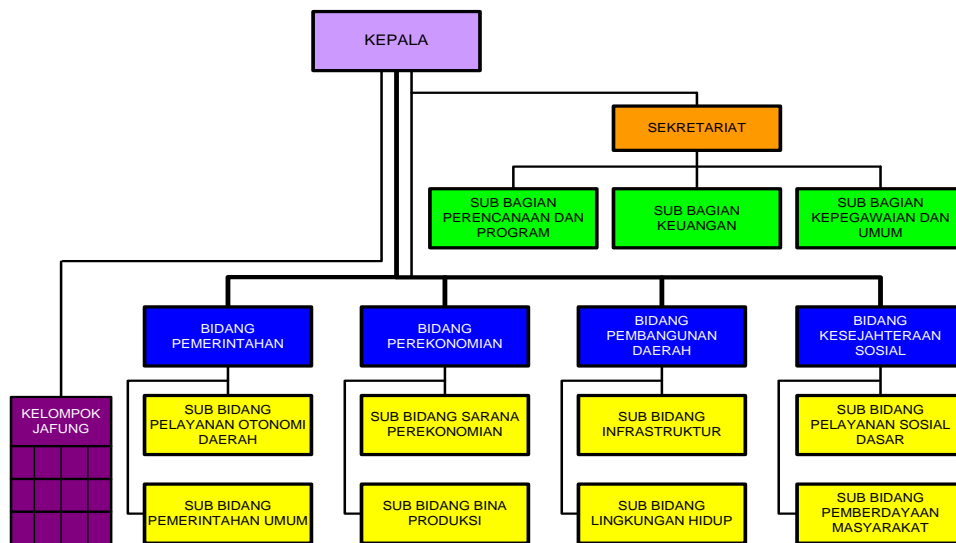
- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden RI Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Laporan Penetapan kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013;
- 12) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009;
- 13) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.

Struktur Organisasi :



Tugas Pokok dan Fungsi

Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan dan penetapan kebijakan koordinasi bidang kesekretariatan, pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah I;
- pemberian dukungan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan bidang kesekretariatan, pemerintahan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah I;
- penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan

- Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan dan penetapan kebijakan koordinasi bidang kesekretariatan, pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah I;
- b. pemberian dukungan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan bidang kesekretariatan, pemerintahan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah I;
- c. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I. Kepala Badan :

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi, monitoring, membina dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Badan :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - b. Menyelenggarakan program kerja Badan;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kesekretariatan, pemerintahan, perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan sosial;
 - e. Menyelenggarakan tugas teknis tertentu sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerjanya;
 - g. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, dan LKPJ Badan;

- h. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pelaporan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan monitoring penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan antar kabupaten/kota dan lintas sektor bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah I;
- k. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi kerjasama pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial antar kabupaten/kota serta antar provinsi dengan kabupaten/kota;
- l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok.

II. Rincian Tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Badan;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, dan LKPJ Badan;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III. Rincian Tugas Bidang Perekonomian :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perekonomian;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi sarana perekonomian di Wilayah I;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi bina produksi di Wilayah I;
- d. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi sarana perekonomian di Wilayah I;
- e. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama perekonomian antar Kabupaten/Kota;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian antar Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi perekonomian;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat di Wilayah I;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

IV. Rincian Tugas Bidang Pemerintahan :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas pelayanan otonomi daerah di Wilayah I;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, monitoring dan evaluasi tugas pemerintahan umum di Wilayah I;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan dan melaksanakan koordinasi pemerintahan lainnya dalam pelaksanaan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. menyelenggarakan kajian bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaporan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pemerintahan antar Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pemerintahan antar Kabupaten/Kota;
- h. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi monitoring, dan evaluasi pertanahan;
- i. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi monitoring, dan evaluasi kependudukan;

- j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pemerintahan;
- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

V. Rincian Tugas Bidang Pembangunan Daerah :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pembangunan Daerah;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di Wilayah I;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah I;
- d. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di Wilayah I;
- e. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah I;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup antar Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup antar Kabupaten/Kota;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pra musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
- i. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tata ruang, pengelolaan kawasan andalan, PKW dan PKN;
- j. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, meliputi jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, penerangan, permukiman, perumahan, perhubungan, reklamasi, konservasi, rehabilitasi, dan kegiatan bidang pembangunan lainnya;
- k. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dananya berasal dari APBN dan APBD di Wilayah I;
- l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
- m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VI. Rincian Tugas Bidang Kesejahteraan Sosial :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kesejahteraan Sosial;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar di Wilayah I;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di Wilayah I;
- d. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar di Wilayah I;
- e. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di Wilayah I;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat antar Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat antar Kabupaten/Kota;
- h. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat, meliputi penanggulangan masalah sosial, keagamaan, pendidikan, budaya, kesehatan, kebencanaan, transmigrasi, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kejadian luar biasa dan masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- i. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan bencana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial;
- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis

Fungsi dan kemampuan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat sangat menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah dengan melakukan optimalisasi fungsi koordinasi dan fasilitasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi agen pembangunan wilayah dan miniatur Provinsi Jawa Barat di wilayah serta kepanjangan tangan Gubernur dalam melaksanakan sebagian fungsinya agar lebih efektif dan efisien. Upaya pemberdayaan potensi dan sumberdaya yang ada dengan bekerjasama secara intens dengan *stakeholders* wilayah diharapkan dapat menangani permasalahan dan issue strategis di wilayah.

Komitmen yang besar dan rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap kepercayaan dalam mengemban tugas dan fungsi untuk turut menciptakan keberhasilan pembangunan kewilayahan melalui sinergitas dan integrasi program dan terjaminnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara kondusif, maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat merefleksikan harapan dan tujuan ke depan melalui penetapan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.

1.1.1. Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kerja koordinasi pembangunan di Jawa Barat, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan jelas, maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat tahun 2013– 2018 mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi	Misi
BKPP Wilayah I sebagai Badan Koordinasi yang handal	a. Mewujudkan Sumber daya Aparatur BKPP yang profesional b. Meningkatkan kerjasama BKPP Wilayah I dengan/antar Kab/Kota, Instansi Vertikal dan OPD Provinsi di Wilayah I Jawa Barat.

1.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Adapun Tujuan dan Sasaran Misi tersebut, adalah:

a) Misi : “Meningkatnya Koordinasi BKPP Wilayah I antar Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan OPD Provinsi di Wilayah I Jawa Barat”.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Sasaran :

- Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat
- Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat

Indikator Sasaran :

- Jumlah kesepakatan dalam bidang Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Sosial

- Jumlah rekomendasi dalam bidang Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Sosial

1.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya BKPP Wilayah I yang meliputi penetapan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Guna memperoleh hasil yang maksimal, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I Provinsi Jawa Barat sesuai Visi dan Misi BKPP Wilayah I, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan prasarana dan sarana BKPP Wilayah I;
2. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur BKPP Wilayah I;
3. Peningkatan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan dengan/antar Kabupaten/ Kota dengan instansi vertikal dan dengan OPD Provinsi di wilayah I;
4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BKPP Wilayah I.

1.1.4. Kebijakan dan Program

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasaran perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Kebijakan ini penting untuk memberikan arah dan koridor yang hendak dilakukan agar Misi yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan tepat. Adapun arah kebijakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2013-2018, sebagai berikut :

Matrik Sasaran Kinerja BKPP Wilayah I Tahun 2013 – 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan kerjasama antar Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan dan pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah I Provinsi Jawa Barat	Jumlah kesepakatan dalam bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial	4	4	4	4	4
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah I Provinsi Jawa Barat	Jumlah rekomendasi dalam bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial	20	29	30	16	20

▪ **Kebijakan :**

- Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kerjasama pemerintahan dan pembangunan di wilayah I.

▪ **Program :**

- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
- Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

- Program Kerjasama Pembangunan;
- Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
- Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan;
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
- Program Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
- Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016

Kinerja organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selain itu juga faktor kepemimpinan dapat mempengaruhi dengan indikasi pada kemampuan pimpinan dalam membuat kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mengetahui rencana kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, maka perlu adanya penjelasan dari elemen dari sasaran dan indikatornya.

Sasaran strategi dan indikator sasaran dari Misi 1 :

Sasaran 1 :

- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BKPP Wilayah I

Indikator Sasaran :

- tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, dengan target capaian sebesar 100 %.

Sasaran 2 :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang sesuai standar daerah.

Indikator Sasaran :

- Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur, dengan target capaian sebanyak 150 Unit.
- Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin, dengan target capaian sebanyak 60 Unit.

Sasaran 3 :

- Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi aparatur BKPP Wilayah I Provinsi Jawa Barat.

Indikator Sasaran :

- persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah, dengan target capaian sebesar 60 %

Sasaran 4 :

- Meningkatnya pengelolaan program dan kegiatan yang cepat, tepat, dan akurat yang berbasis teknologi informasi.

Indikator Sasaran :

- tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, dengan target capaian sebesar 100 %.

❖ **Sasaran strategi dan indikator sasaran dari Misi 2 :**

Sasaran 1 :

- Meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi pembangunan kewilayahan, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indikator Sasaran :

- Jumlah Kerjasama Provinsi Berbatasan dengan target 2 dokumen

Sasaran 2 :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas program kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antar Provinsi.

Indikator Sasaran :

- Implementasi Tematik Kewilayahan oleh OPD Provinsi Jawa Barat, dengan target capaian sebesar 70 %.
- Implementasi Tematik Kewilayahan oleh Kabupaten/Kota di Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan target capaian sebesar 70 %.

Sasaran 3 :

- Meningkatnya sinergitas perencanaan dan penganggaran.

Indikator Sasaran :

- Prosentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan, dengan target capaian sebesar 90 %.
- Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota, dengan target capaian sebesar 95 %

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I telah menetapkan kinerja Tahun 2016 yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016 melalui Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Barat, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi pembangunan kewilayahan, baik Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	a. Jumlah Kesepakatan dalam bidang : - Pemerintahan - Pembangunan - Perekonomian - Kesejahteraan Sosial	4
		b. Jumlah rekomendasi dalam bidang : - Pemerintahan - Pembangunan - Perekonomian - Kesejahteraan Sosial	30

2.3.2 Program, Kegiatan dan Anggaran

Program

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pada tiap-tiap Misi, dalam implementasinya telah ditetapkan terlebih dahulu programnya. Program merupakan sekumpulan kegiatan yang secara sistematis dan terpadu serta nyata yang dilaksanakan oleh beberapa instansi maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipatif aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun

program-program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat adalah :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
- d. Program Pelayanan Administrasi Daerah Perkantoran
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- f. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu satu tahun atau kurang yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari program sehingga kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Adapun kegiatan yang telah ditetapkan tersebut adalah :

1. Penataan Batas Wilayah di Wilayah I.
2. Forum BKPP Tahun 2016.
3. Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah.
5. Pelaksanaan Pra Musrenbang Wilayah I.
6. Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas.
7. Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Usaha.
8. Pengembangan Agribisnis dan Agro Industri.
9. Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul Lainnya.
10. Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Kemandirian Pangan.
11. PPP Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Center) Palabuhanratu Raya.
12. Advisor Pembangunan Jawa Barat.

13. Pengembangan Agrowisata Koridor Bogor-Puncak-Cianjur; Ekowisata Pemandangan Alam Koridor Bogor-Sukabumi-Palabuhanratu.
14. Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global.
15. Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras dan Unggas Lokal.
16. Sinergitas Pengembangan Bidang Perekonomian.
17. Sinergitas Pemerintahan Kelurahan Desa se Wilayah I.
18. Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah I.
19. Sinergitas Aspek Kesejahteraan Sosial di Wilayah I.
20. Sinergitas Kependudukan di Wilayah I.
21. Rapat Kerjasama Antar Daerah di Wilayah I.
22. Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Anggaran Tahun 2016

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, perlu adanya anggaran yang memadai. Untuk Tahun Anggaran 2016, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat memperoleh dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 16,980,760,483.00 Anggaran tersebut akan digunakan untuk Belanja Rutin atau operasional dan Belanja Kegiatan.

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	- Forum BKPP Tahun 2016	179.550.000
	- Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	213.750.000
	- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah	76.950.000
	- Pelaksanaan Pra Musrenbang Wilayah I	160.920.000
	- Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas	256.500.000
	- Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Usaha	76.950.000
	- Pengembangan Agribisnis dan Agro Industri	76.950.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
	- Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul Lainnya	51.300.000
	- Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Kemandirian Pangan	76.950.000
	- PPP Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Center) Palabuhanratu Raya	51.300.000
	- Advisor Pembangunan Jawa Barat	51.300.000
	- Pengembangan Agrowisata Koridor Bogor-Puncak-Cianjur;Ekowisata Pemandangan Alam Koridor Bogor-Sukabumi-Palabuhanratu	51.300.000
	- Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global	51.300.000
	- Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras dan Unggas Lokal	51.300.000
	- Sinergitas Pengembangan Bidang Perekonomian	51.300.000
	- Sinergitas Pemerintahan Kelurahan Desa se Wilayah I	51.300.000
	- Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah I	179.550.000
	- Sinergitas Aspek Kesejahteraan Sosial di Wilayah I	205.200.000
	- Sinergitas Kependudukan di Wilayah I	102.600.000
	- Rapat Kerjasama Antar Daerah di Wilayah I	51.300.000
	- Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.650.000
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	153.900.000
2	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	
	- Penataan Batas Wilayah di Wilayah I	38.475.000
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	
	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	299.475.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	- Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	1.893.060.000
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.246.160.500
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah I	1.599.252.500
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Internal OPD	115.425.000
	- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan BKPP Wilayah I	100.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler, mingguan, bulanan, triwulanan seterusnya.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survei sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

Pengukuran kinerja sebagai dukungan pencapaian sasaran meliputi: (1) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja, dan (2) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Prosentase pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
> 100 %	Sangat Baik
80 – 100 %	Baik
50 - < 80 %	Sedang
< 50 %	Kurang

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh rata-rata capaian sasaran dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.1
TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2015-2016

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Jumlah Kesepakatan Dalam Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan	BUAH	4	4	4	4
2	Jumlah Rekomendasi Dalam Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah	BUAH	26	26	30	30

Berdasarkan analisis diatas, bahwa target capaian kinerja tahun 2016 pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I telah memenuhi kriteria

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
			TARGET	REALISASI		
1	Jumlah Kesepakatan Dalam Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah	BUAH	4	4	100	BAIK
2	Jumlah Rekomendasi Dalam Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah	BUAH	30	30	100	BAIK

Berdasarkan analisis diatas, bahwa target capaian kinerja tahun 2016 pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I telah memenuhi kriteria **BAIK**, dengan capaian 100 % pada masing-masing target indikator kinerja.

3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, berdasarkan sasaran misi sebagai berikut:

Misi :
a. Mewujudkan Sumber daya Aparatur BKPP yang profesional
b. Meningkatkan kerjasama BKPP Wilayah I dengan/antar Kab/Kota, Instansi Vertikal dan OPD Provinsi di Wilayah I Jawa Barat.
Sasaran :
Meningkatnya kerjasama antar Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan dan pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat

3.1.5. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Sasaran strategi, maka sasaran strategi dan berjalan dengan baik dan lancar serta telah mencapai capaian 100% dari target yang direncanakan. Hal ini dikarenakan terdapat dukungan yang positif dari para aparatur, pelaksana kegiatan maupun sarana dan parasarana yang tersedia. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang tercapainya Misi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.

Sasaran : Tercapainya Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi di Wilayah I Predikat **Baik** dengan capaian kinerja 100 %

3.1.6 Rencana Program dan Kegiatan

Adapun rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah :

No	Program/Kegiatan
A	Belanja Langsung
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Pra Musrenbang di Wilayah I
	Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas
	Sinergitas Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
	Sinergitas Aspek Kesejahteraan Sosial se Wilayah I
	Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Sinergitas Percepatan Penyerapan Anggaran di Wilayah I
	Forum BKPP Tahun 2017
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Gubernur Tahun 2017
	Sinergitas Pemerintahan Kelurahan/Desa se Wilayah I
	Sinergitas Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum se Wilayah I
	Sinergitas KEpendudukan di Wilayah I
	Rapat Kerjasama Antar Daerah di Wilayah I
	Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam rangka peningkatan Dunia Usaha
	Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri
	Pengembangan Sentra Benih Pertanian Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Pencapaian Swasembada padi, jagung dan kedelai
	Sinergitas Peningkatan Promosi Produk Unggulan Wilayah I
	Sinergitas Pengembangan Wisata Jabar Selatan dan Pengembangan Geopark Ciletuh
	Pengembangan Perkebunan Kopi dan Kakao

No	Program/Kegiatan
	Monitoring Pengembangan Agrowisata Koridor Bogor-Puncak-Cianjur; Ekowisata Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor-Sukabumi-Palabuhanratu.
	Pengembangan Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global
	Monitoring Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong dan Sapi Perah
2.	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
	Penataan Batas Wilayah di Wilayah I
3.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPP Wilayah I
	Pembinaan Budaya Baca Al-Quran dan Keagamaan Aparatur BKPP Wilayah I
	Penanaman Sikap Mental Disiplin dan Jiwa Korsa Aparatur BKPP Wilayah I
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Batik, dan Pakaian Olahraga
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional
	Pemeliharaan Rutin Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan dan Jasa Pengemudi
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Aula, Mess dan Sarana Olahraga
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Sismontep
	Penyusunan LPPD, TAPKIN, LKPJ dan LKIP
	Penyusunan RKA, RKPD, RENJA, dan RKT
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

3.2 Akuntabilitas Anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran BKPP Wilayah I Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DAERAH		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30,000,000.00	35,000,000.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	30,000,000.00	35,000,000.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah		
	JUMLAH	30,000,000.00	35,000,000.00
2	BELANJA		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,416,268,983.00	7,863,859,552.00
2.1.1	Belanja Pegawai	8,416,268,983.00	7,863,859,552.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	8,564,491,500.00	8,526,997,765.00
2.2.1	Belanja Pegawai	305,980,000.00	485,952,000.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,344,207,992.00	6,499,394,265.00
2.2.3	Belanja Modal	1,914,303,508.00	2,298,598,461.00
2.2.3.1	Belanja Tanah		
2.2.3.2	Belanja Peralatan dan Mesin	527,415,500.00	524,695,500.00
2.2.3.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1,297,243,208.00	1,294,246,425.00
2.2.3.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,875,000.00	14,875,000.00
2.2.3.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	74,769,800.00	74,769,800.00
2.2.3.6	Belanja Aset Lainnya		
	JUMLAH	16,950,760,483.00	16,335,857,317.00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKPP Wilayah I disusun sebagai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, disimpulkan bahwa sasaran tercapai dengan predikat **Baik**.

Secara umum dalam pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 tidak terdapat kendala dan hambatan, langkah antisipatifnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu direncanakan secara akurat. Terkait dengan hal tersebut untuk meningkatkan target indikator sasaran yang mendapat kategori **Baik** pada tahun mendatang perlu ditingkatkan menjadi **Sangat Baik** dengan:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Mendorong keberhasilan kegiatan tematik kewilayahan;
3. Peningkatan koordinasi pembangunan dengan kabupaten kota di wilayah I.

Sedangkan untuk meningkatkan target indikator sasaran yang mendapat kategori **Baik** pada tahun mendatang perlu ditingkatkan menjadi **Sangat Baik** dengan peningkatan sistem informasi mengenai prioritas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi atau peta permasalahan di lapangan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan mengarah pada kondisi permasalahan yang sebenarnya.